JAMINAN REHABILITASI PSIKOLOGIS ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL; PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

¹Mhd Ary Fadhillah Nasution, ²Mhd Rafly, ³Bagus Ramadi

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: mhdaryfadhillahnasution@gmail.com, mhdrafly870@gmail.com,
bagusramadi@uinsu.ac.id

Abstract

Children are immature individuals both physically, psychologically and socially. Because of this, the condition is still vulnerable and developing, so children are more at risk of being exposed to acts of sexual exploitation. Sexual violence committed against children definitely has an impact on the child's psychology and development. Therefore, it is necessary to reform the law enforcement of child sexual crimes as a concept for child protection and to guarantee the rehabilitation of children who suffer as sexual victims. Recently, the Islamic teaching approach has been designed as a therapeutic technique whose aim is to improve individual psychological well-being. There are so many legal bases regarding child protection or rehabilitation. One of them is that in Article 64 of the Republic of Indonesia Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, it is explained that a child who is involved in being a victim of a criminal act, whether because of a sexual crime, has the right to receive rehabilitation from the government physically, psychologically, spiritually and socially. So that every child is able to assume their responsibility in ensuring their existence as the successor of the nation and state in the future.

Keywords: *Children, Sexual Exploitation, Rehabilitation*

Abstrak

Anak-anak merupakan pribadi yang belum matang baik secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Karena itu kondisinya masih rentan dan berkembang, sehingga anak lebih berisiko terkena tindak eksploitasi seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak sudah pasti berdampak pada psikologis serta perkembangan anak tersebut. Maka dari itu, diperlukan reformasi penegakan hukum kejahatan seksual anak sebagai konsep perlindungan anak dan jaminan rehabilitasi anak yang menderita sebagai korban seksual. Belakangan ini pendekatan ajaran Islam didesain menjadi suatu teknik terapi yang tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan individu dalam hal psikologisnya. Terdapat begitu banyak dasar-dasar hukum mengenai perlindungan ataupun rehabilitasi anak. Salah satunya di dalam Pasal 64 UU RI No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dijelaskan bahwa seorang anak yang terlibat menjadi korban tindak pidana baik itu karena tindak pidana seksual berhak untuk mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah secara fisik maupun psikis, spiritual dan sosial. Sehingga setiap anak mampu memikul tanggung jawabnya dalam menjamin eksistensi sebagai penerus bangsa dan negara di masa depan.

Kata Kunci: Anak-Anak, Eksploitasi Seksual, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Anak merupakan tumpuan bagi bangsa, masyarakat dan keluarganya. Artinya anak dapat merubah bangsa menjadi lebih baik kedepannya. Jikalau kita sadari, anak adalah harapan bagi kita semua, pasti kita semua dapat terpanggil untuk membantu anak-anak tumbuh dan juga berkembang dengan baik ataupun sehat secara fisik, psikologis, serta spiritualnya.¹ Anak juga sering dianggap harta yang paling berharga dibandingkan dengan harta lainnya. Sebab anak merupakan amanah dari Allah SWT, yang karena itu anak harus senantiasa dilindungi dan dijaga. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) dan juga dalam keadaan tauhid, sehingga memiliki akan potensi kebaikan. Namun begitu seorang anak yang lahir di tangan kedua orang tuanya, pertama kali anak akan dididik sesuai keinginan orang tuanya. Jadi anak itu diibaratkan seperti adonan tepung yang lembut dan bisa dibentuk sesuai apa yang diinginkan. Maka, jika seorang anak dilatih kedua orang tuanya kebaikan mulai dari kecil, dengan begitu kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan baik kedepannya, karena dasarnya seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah ataupun suci.

Negara memandang bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan harus dilindungi. Hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang bunyinya, Supaya setiap anak mampu memikul tanggung jawabnya dalam menjamin eksistensi sebagai penerus bangsa dan negara di masa depan. Maka dari itu, anak harus memperoleh kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang yang optimal, baik secara fisik, psikologis, juga sosial, sehingga berakhlakul karimah.

Anak-anak harus berkesempatan untuk merasakan indahny hidup, merasakan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya dan sesama manusia, sehingga kejahatan seksual terhadap anak tidak terjadi lagi. Tak bisa dipungkiri kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, masih sering kali terjadi. Dalam data *End Child Prostitution Child Pornography And Trafficking Of Children For Sexual Purposes* (ECPAT), yakni organisasi bergerak dalam mengakhiri prostitusi, pornografi, dan perdagangan anak untuk seksual, menyatakan bahwa Asia Tenggara sebagai sasaran jaringan sindikat eksploitasi kejahatan seksual anak. Di Indonesia telah ditemukan anak gadis yang memalsukan umur dan diperkirakan 30 persen merupakan PSK yang masih dibawah umur (belum mencapai 18 tahun).²

¹ Luh Ketut Suryani, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2009), h. VII.

² Widya Cindy Kirana Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Anak", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni, 2022), h. 62.

Anak merupakan pribadi yang belum matang baik secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Karena itu kondisinya masih rentan dan berkembang, sehingga anak lebih berisiko terkena tindak eksploitasi seksual. Kejahatan seksual anak merupakan pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tersebut sepenuhnya tidak memahami, dan tidak mampu memberikan persetujuan atau karena usianya belum siap untuk memberikan persetujuan, dan belum mengetahui aturan hukum atau pantangan di masyarakat yang merupakan segala tingkah laku seksual. Contohnya saja seperti pelacuran anak-anak, pornografi, oral sex, intercourse, dan lain-lainnya. Kejahatan Seksual bisa sangat berdampak buruk bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual, yakni mempengaruhi kesehatan fisik dan juga psikis pada jangka waktu yang lama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang dokter dituntut agar selalu siap dalam memberikan pertolongan terhadap korban, termasuk dalam urusan kekerasan seksual anak.³ Berdasarkan data ECPAT Internasional, eksploitasi seksual anak adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, salah satu caranya yaitu dengan memberikan imbalan uang. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak kejahatan seksual anak, ada bermacam-macam, mulai dari membelikan, menawarkan, ataupun menyediakan sesuatu dengan cara membujuk anak tersebut. Bahkan juga ada dengan cara pemaksaan.⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 59 A tentang aturan keamanan anak sebagai korban eksploitasi seksual, dan ini juga tertera dalam pasal 66. Di dalam ajaran Islam juga diatur mengenai setiap anak harus dijaga dengan benar, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-quran surat Al-An'am pada ayat 151.

Permasalahan ini merupakan hal yang penting untuk kita bahas. Bisa kita lihat dari beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Selain dengan melihat permasalahan ini terjadi, selanjutnya akan dibahas lebih fokus mengenai jaminan rehabilitasi psikologis anak yang menjadi korban eksploitasi seksual menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak kejahatan perdagangan orang, yang dimana dengan melakukan perlindungan terhadap anak dan melakukan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual. Penelitian ini dalam mengkaji tentang jaminan rehabilitasi psikologis anak yang menjadi korban eksploitasi seksual berdasarkan persepektif yuridis normatif, yakni dengan mencari bahan-bahan aturan yang terdapat dalam prinsip-prinsip, doktrin-doktrin hukum, dan Undang-Undang agar membentuk argumentasi dalam menghadapi sekaligus menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan reformasi penegakan hukum kejahatan seksual anak sebagai konsep perlindungan anak dan jaminan rehabilitasi

³ Ratna Dewi P, *Pemeriksaan Fisik dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja*, (Bandar Lampung: Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2017), h. 5.

⁴ Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, (Bojonegoro: Mazda Media, 2021), h. 8.

psikologis anak yang menderita sebagai korban seksual yang berkesinambungan. Penelitian ini berfokus kepada permasalahan tersebut dengan berdasarkan pandangan hukum Islam dan hukum positif. Sehingga nantinya penelitian ini akan membahas tentang rehabilitasi bagi anak (korban), dan sanksi bagi pelakunya yang termuat dalam hukum Islam dan hukum positif.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan aturan normatif dengan melalui pendekatan hukum Islam, pendekatan konseptual, dan pendekatan UU (*state approach*) dalam memecahkan masalah rehabilitasi psikologis anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, yang berdasar kepada hukum Islam dan hukum positif. Adapun sumber-sumber bahan yang dipakai adalah dengan menggunakan kajian kepustakaan, yang terutama berasal dari sumber hukum Islam, buku-buku, jurnal-jurnal, Undang-Undang, dan internet yang memiliki ketertaitan dengan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban seksual sebagaimana permasalahan diatas.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan Rehabilitasi Psikologis Anak Korban Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam dikenal dengan konsep maqashid syariah. Imam Asy-Syaitibi (seorang ahli hukum penganut Madzhab Maliki), menyatakan bahwa dalam urusan kepentingan dunia, ada lima hal yang harus diutamakan. Lima hal tersebut adalah menjaga agama, jiwa, pemikiran, keturunan, serta harta. Maksudnya adalah bahwa harkat dan martabat manusia harus dijaga. Hal ini berhubungan dengan kepentingan seorang anak, bahwa anak harus dipastikan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka dari itu, kita harus berjuang untuk segera mencegah, menghentikan segala bentuk kekerasan, pelecehan seksual, penelantaran, dan eksploitasi tidak manusiawi lainnya bagi anak-anak, termasuk eksploitasi seksual anak, serta memberikan rehabilitasi terhadap anak yang menderita sebagai korban seksual, baik dari segi fisik maupun psikisnya.⁶

Tindak pidana seksual terhadap anak belakangan ini selalu menjadi perbincangan yang hangat serta mengundang perhatian di masyarakat. Sebab tak jarang media sosial dan media cetak banyak ditemukan berita kasus tindak kekerasan seksual kepada anak di seluruh Indonesia. Kekerasan seksual kepada anak terjadi di tempat mana saja, seperti di tempat yang aman, yakni rumah, diluar rumah, serta dilingkungan sekitar tempat tinggal, bahkan yang lebih parahnya lagi ialah di sekolah. Hal ini berarti bahwa tindak kejahatan seksual adalah hal yang sangat memberikan acaman berbahaya bagi anak-anak. Mirisnya adalah bahwa

⁵ Anak Agaung Mas Stela Kurtikaadi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukuryati Karma, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3, (September, 2021), h. 629.

⁶ *Ibid.*, h. 631.

pelaku kejahatan seksual merasa bahwa anak-anak dapat menjadi sasaran yang tepat dalam menyalurkan nafsu seksualnya. Hal ini dipengaruhi karena adanya pendapat ataupun anggapan yang menyatakan bahwa anak-anak belum cukup mampu mengerti bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah tindak pidana atau anak-anak belum berani dalam menolak keinginan dari si pelaku mengingat si pelaku adalah orang yang di atasnya atau dewasa.

Kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak sudah pasti berdampak pada psikologis serta perkembangan anak tersebut. Pada umumnya, anak (korban) kekerasan seksual dilaporkan mengalami gangguan, seperti sulitnya dalam berkonsentrasi, sulitnya untuk tidur, kurangnya nafsu makan, menurunnya dalam beraktivitas, tidak percaya kepada diri sendiri, depresi, dan berkurangnya energi. Dampak psikologis anak-anak tersebut yang akan membuat trauma yang panjang yang selanjutnya akan melahirkan sikap yang tidak baik, seperti rasa takut yang berlebihan, minder, atau bahkan perkembangan jiwanya terganggu, sehingga berakibat keterbelakangan mental. Keadaan tersebutlah yang memungkinkan menjadi suatu kenangan buruk bagi anak (korban kejahatan seksual). Seto Mulyadi (psikolog anak) menyatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual perlu diperhatikan serius baik keluarganya maupun pemerintah, tidak hanya dengan memulihkan kembali kondisi trauma, akan tetapi juga supaya anak-anak tersebut tidak berubah menjadi pelaku di masa yang akan datang. Karena itu, anak yang menderita sebagai korban kejahatan seksual memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus, yakni bentuk perlindungan seperti mendapatkan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa tumbuh kembang anak. Perlindungan anak juga termasuk rehabilitasi sosial.⁷

Rehabilitasi sosial tersebut merupakan suatu tindakan memulihkan dengan pelayanan yang baik kepada anak baik secara fisik, psikologis, maupun sosial agar kepercayaan diri anak dapat kembali atau pulih dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Rehabilitasi merupakan proses mengembalikan kemampuan yang pernah dimiliki anak seperti semula. Karena orang yang kehilangan akan kemampuannya adalah suatu musibah. Sehingga rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan dalam melakukan aksi pencegahan supaya tidak semakin parah dan meningkatnya penyakit atau luka yang diderita oleh si korban serta bagian dari penyembuhan kemampuan individu yang berkebutuhan akan pelayanan khusus.⁸

Penanganan yang holistik dalam mengupayakan rehabilitasi (pemulihan) korban bisa diprediksikan akan memperoleh hasil yang berpengaruh. Seorang anak yang telah memperoleh pemulihan melalui usaha rehabilitasi harus menghadapi

⁷ Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 8, (2021), h. 1292.

⁸ *Ibid.*, h. 1294.

kembali integrasi sosial melalui pendamping, yakni pekerja sosial atau psikolog, dan orang tua perlu untuk dipersiapkan mental dan pengetahuannya mengasuh anak yang menderita trauma akibat kekerasan seksual. Dengan demikian, orang tua harus juga memperoleh rehabilitasi, supaya kesehatan psikologisnya tetap terjaga dengan baik. Akan tetapi banyak yang belum sadar bahwa dampak-dampak hal tersebut juga dialami oleh para orang tua si anak yang menjadi korban.

Dalam Islam rehabilitasi dilakukan secara bertahap. Tahapan pertama bisa dimulai dari orang tua si anak yang menjadi korban seksual dengan melakukan rehabilitasi secara pribadi, yang pada tahapan ini ayah dan juga ibu dapat diberikan terapi dalam beberapa sesi terpisah yang tujuannya adalah mengurangi tingkat stres yang dialaminya, memberikan keterampilan dalam menghadapi traumanya, dan dapat menstabilkan dirinya dalam menghadapi hal tersebut. Tahapan kedua adalah terapi qanaah, yang dimana ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni tahapan kesadaran, kebersyukuran, menyambut, melepaskan penilaian diri, menjauhkan diri dari emosi yang bersifat negatif, dan kemauan membuka diri dengan orang lain atau sekitarnya. Sehingga jauh dari hal-hal yang terkait dengan perasaan, pikiran, dan rasa sakit ketika mendapatkan stimuli yang mengingatkan akan kejadian yang menimpa anaknya. Karena tahapan ini merupakan bentuk usaha dalam menerima segala hal negatif tersebut, bukan malah mengalihkan atau menghindar. Tahapan ketiga atau terakhir adalah tahapan dimana konselor harus membantu menenangkan diri klien dengan perlahan-lahan saat bereaksi menerima pikiran dan perasaan yang negatif tersebut. Selain itu, tahapan ini dapat memisahkan diri dari emosi, yakni dengan cara konselor mengajak klien supaya membangun jarak dengan emosi negatifnya melalui teknik relaksasi dan dzikir (mengingat Allah SWT). Penyembuhan trauma islami (*Islamic trauma healing*) tersebut dilakukan agar berhasilnya dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis orang tua yang anaknya menjadi korban seksual sehingga dapat mengasuh dan merawat anak yang pusatnya pada keluarga (orang tua) dalam mencapai tujuan mengusahakan pencegahan trauma yang akan dirasakan anak serta memperbaiki atau memulihkan keberfungsian sosial anak yang menjadi korban seksual.⁹ Sebab pada intinya setiap orang tua pasti sangat menginginkan anaknya sukses ketika dewasa. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya gagal dalam kehidupannya. Untuk memenuhi keinginan tersebut, orang tua harus berusaha sekuat mungkin untuk memberikan perhatian yang besar kepada anaknya. Dalam Islam anak berhak mendapatkan pangan dan sandang yang layak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sehat dan cerdas.

⁹ Temmy Andreas Habibie dan Qurotul Uyun, "Model Intervensi Islam Dalam Penanganan Gejala Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Orang Tua Yang Memiliki Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Psikologi Islam dan Kontemporer*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2023), h. 228.

Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia yang dapat mengajarkan penguatan terhadap spritual dan psikologis kepada seseorang saat mengalami masa-masa sulitnya. Sebab pada umumnya, cara masyarakat Muslim di Indonesia saat menghadapi masalahnya adalah dengan bersyukur, sabar, tawakkal, dan ikhlas (meluruskan niat kepada Allah SWT) serta ittiba' (mengikuti cara Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam). Meskipun teknik dalam Islam mengenai psikologis ini masih tergolong dalam perkembangan sehingga membutuhkan waktu untuk penyempurnaan atas pelaksanaannya serta bukti supaya dapat meyakinkan pemerintah dan sebagainya.¹⁰

Dikarenakan hubungannya religiusitas dengan kesehatan psikologis sudah terjalin dengan positif, gambaran tentang adanya hubungan yang dirasakan seseorang dengan Allah menjadi faktor utama atau penting dalam kaitannya hubungan antara religiusitas dengan kesehatan psikologis. Utamanya adalah ketika Allah dimaknai sebagai yang Maha Pengampun. Penduduk di Indonesia yang merupakan bagian dari budaya timur memiliki hubungan yang cukup dekat dengan spiritualitas dan religiusitas. Diantaranya seperti tentang bahagianya masyarakat jika individu dapat memenuhi kewajibannya akan perintah agamanya atau juga tujuan yang sifatnya spiritual, sehingga hubungan antara religiusitas dengan spritualitas memiliki nilai dan falsafah yang dalam (unik).

Dalam Islam juga telah ditetapkan bahwa keserasian HAM lebih tinggi dari pada ibadah-ibadah ritual. Sehingga ketika seseorang tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya kepada Allah, maka mungkin jika orang tersebut bertaubat masih bisa mendapatkan kesempatan diampuni oleh Allah, namun berbeda apabila ada kasus kita dengan seseorang atau permasalahan kita dengan seseorang yang kita tidak dapat memenuhi kewajiban kepadanya. Anak adalah makhluk yang mulia keberadaannya berdasarkan kehendak Allah SWT. Kedudukan anak dalam Islam dapat kita temukan dalam Al-quran Surah Al-Isra' ayat 70, yang artinya: *"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami telah lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."* Penjelasan dalam surah ini diikuti dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya: *"Setiap anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicaranya."* Maka dari itu Islam sangat mencela kejahatan atau kekerasan terlebih lagi kepada anak. Seperti yang telah dicontohkan dari Nabi Muhammad sendiri yang tidak pernah memukul anak, istri, bahkan pembantunya. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayannya, kecuali apabila berjihad di jalan Allah (HR. Muslim).

Meskipun hukum Islam sebagai hukum positif terbatas, namun didalamnya tidak menghilangkan keagungan sebagai agama rahmatan lil 'alamin yang selalu

¹⁰ *Ibid.*, h. 225.

memperhatikan keselamatan manusia di dunia ini. Salah satunya dalam hukum Islam adalah tentang anak. Dari sejak awal atau bahkan jauh sebelum muncul Undang-Undang tentang Perlindungan terhadap Anak, agama Islam sudah serius terlebih dahulu dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang dibuktikan dengan adanya ayat-ayat yang membahas perlindungan hak-hak kepada anak. Dengan demikian, keseriusan syariat Islam dalam melindungi, merawat, dan membesarkan anak adalah hal yang mutlak dan merupakan ajaran suci dan original berasal dari wahyu Ilahi, yang sudah jauh muncul sebelum adanya landasan dari Undang-Undang, yakni UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Hak Asasi Manusia dan Konvensi PBB mengenai hak-hak anak. Adanya pengakuan dan perlindungan kepada anak muncul ketika Nabi Muhammad ibn Abdullah menjadi seorang rasul. Di dalam syariat Islam, benar-benar tidak terdapat keraguan didalamnya dan bisa menjadi pelopor berlangsungnya hak asasi manusia di dunia. Oleh karena itu, anak merupakan titipan dan amanah dari Allah SWT yang wajib ditangani dengan baik dan benar.¹¹

B. Jaminan Rehabilitasi Psikologis Anak Korban Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Positif

Tindak pidana eksploitasi seksual anak merupakan hal yang berbeda baik dari segi bentuk kasus maupun penanganannya dengan tindak pidana Kekerasan terhadap anak secara umum. Saat ini, jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi seksual sangat banyak dan di dalam tindak pidana ini dapat memberikan rasa trauma yang berkepanjangan. Eksploitasi seksual ini sering terjadi pada jenis kelamin perempuan. Karena kita ketahui bahwa anak perempuan lah yang paling mudah untuk dibujuk, dan kalau dijual, harga jualnya sudah pasti tinggi. Namun hal ini malah membuat konsumen rela menghabiskan isi kantong sampai jutaan rupiah. Sebab mereka beranggapan bahwa perempuan dalam usia anak bersih dari penyakit kelamin dan sudah pasti belum banyak yang memakainya dan mungkin saja anak tersebut masih perawan. Hal inilah yang membuat pelaku eksploitasi anak melalui jalur perdagangan orang, memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari keuntungan biasanya. Ada tiga bentuk dalam eksploitasi kekerasan seksual anak, yaitu prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak.¹²

Negara memandang bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan harus dilindungi. Hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang bunyinya, supaya setiap anak mampu memikul tanggung jawabnya dalam menjamin eksistensi sebagai penerus bangsa dan negara di masa depan. Maka dari

¹¹ Ibrahim Ihksan Lubis, Fatimah Zahara, dan Akmaluddin Syahputra, "Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor)", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (Agustus, 2023), h. 180.

¹² Nimrot Siahaan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6, No. 2, (September, 2018), h. 105.

itu, anak harus memperoleh kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang yang optimal, baik secara fisik, psikologis, juga sosial, sehingga berakhlakul karimah. Adapun jaminan dalam perlindungan akan kesejahteraan anak, tampak dari banyaknya aturan perundangan yang diberlakukan. Salah satu penerapannya adalah pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak yang tugasnya dalam melindungi hak-hak anak baik menjamin anak yang terlibat hukum dan anak yang menjadi korban kekerasan akan mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga anak yang menjadi korban sangat perlu mendapatkan rehabilitasi karena kejadian yang menimpanya adalah sebuah trauma. Menurut Dr. Sarimurti Widiyastuti S.H., M.Hum, selaku pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA), dalam proses rehabilitasi korban kejahatan seksual kepada anak, mereka menggunakan cara, yakni memulihkan keadaan mereka hingga seperti semula. Adapun beberapa tahapan dalam mengubah suatu trauma, yakni P2TPA harus bekerja lebih keras dalam mengembalikan psikis atau mental korban. Akan tetapi apabila korban menderita trauma yang panjang maka p2TPA harus merujuknya ke psikiater dan pihak p2TPA tetap memonitoring korban sampai korban benar-benar sembuh atau pulih dari trauma yang dialaminya sehingga siap kembali ke lingkungan masyarakat dan terbebas dari segala macam kejahatan. Selanjutnya, berdasarkan wawancara dari bapak Pranawa S.H sebagai pelaksana harian dalam Lembaga Perlindungan Anak, terdapat tiga aspek peran lembaga perlindungan anak yang menjadi korban kejahatan seksual, adalah:

1. Aspek Yuridis, yakni fungsi lembaga perlindungan anak dalam aspek yuridis merupakan memberikan fasilitas berupa lawyer kepada korban dalam proses hukum dan diluar proses hukum, yang tujuannya adalah membela kepentingan hukum si anak sebagai korban.

2. Aspek Psikologis, yakni yang memiliki tujuan dalam membantu korban yang sedang mengalami misalnya saja seperti depresi, trauma, serta tidak mau bergaul dengan temannya yang nantinya akan lakukan observasi psikologi.

3. Aspek Medis, yakni aspek medis yang hanya ada jika ada pengaduan dari pihak korban. Aspek medis ini terkadang dilakukan dengan visum (mengetahui rusak atau tidak alat kelamin korban), yang nantinya si bisem tersebut digunakan sebagai alat bukti polisi di dalam proses penyidikan.

Di dalam Pasal 64 UU RI No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dijelaskan bahwa seorang anak yang terlibat menjadi korban tindak pidana baik itu karena tindak pidana seksual berhak untuk mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah secara fisik maupun psikis, spiritual dan sosial. Selain dari itu, privasinya juga wajib untuk dilindungi seperti menjaga nama baiknya dan keselamatannya, yang dimana ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, hal yang serupa juga diatur dalam Pasal 65 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjelaskan bahwa: rehabilitasi harus diberikan kepada semua

korban tindak pidana, termasuk tindak pidana seksual kepada anak yang melakukan pemulihan baik dari segi fisik dan psikisnya. Sehingga lembaga-lembaga perlindungan anak harus lebih aktif untuk memberikan bantuan termasuk rehabilitasi anak (korban) sesuai perintah undang-undang. Dengan demikian, sebagai bentuk perlindungan pada anak yang menjadi korban ialah dengan memberikan rehabilitasi dan restitusi.¹³

Pada tahun 2002 Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Undang-undang inilah yang menegaskan kewajiban dalam memberi perlindungan terhadap anak yang berdasar kepada asas non diskriminasi, asas perkembangan anak, asas kepentingan terbaik untuk anak, asas hak hidup, serta asas menghargai pendapat dari anak. Undang-undang ini juga lah yang memberikan pengertian dari yang dimaksud dengan anak yang terdapat pada Pasal 1 angka 1, yakni anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk juga anak yang dalam kandungan. Selanjutnya dalam angka 2 memberikan definisi tentang perlindungan anak, yakni segala kegiatan dalam menjamin maupun melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi dengan optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, juga dilindungi dari kejahatan dan diskriminasi. Maraknya kejahatan seksual kepada anak membuat pemerintah lebih perhatian dalam mengatasi hal tersebut. Sehingga lahirlah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yang bermaksud agar sempurnanya Undang-Undang yang sebelumnya, sehingga anak yang menjadi korban seksual mendapatkan perlindungan yang lebih. Peraturan terkait dengan tindak pidana seksual kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan ancaman pidana yang memberatkan sanksi pidana serta denda terhadap si pelaku tindak pidana terhadap anak, dimaksudkan agar dapat memberikan efek jera. Selain itu Undang-Undang inilah yang menopang adanya langkah konkrit dalam memulihkan fisik, psikis, serta sosial anak sebagai korban.¹⁴ Namun demikian, ada kenyataannya pemberatan sanksi pidana pelaku kejahatan seksual anak dalam Undang-Undang ini belum bisa memberikan efek jera si pelaku.

Berdasarkan bukti dari naiknya data kejahatan seksual dari tahun ke tahun yang kemudian pada tahun 2016 peristiwa pemerkosaan terjadi kepada Yuyun oleh 14 orang laki-laki sehingga korban tersebut meninggal dunia. Dalam peristiwa itulah sehingga masyarakat bereaksi keras terhadap pemerintah, agar pemerintah dapat berlaku tegas terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2016, pada tanggal 25 Mei 2016 mengenai perubahan kedua terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, yang selanjutnya ditetapkan menjadi

¹³ Ija Suntana, *Etika Pendidikan Anak*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 5.

¹⁴ Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 5, (April, 2020), h. 290.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Undang-Undang inilah yang pada intinya memperberat pidana penjara serta denda pelaku yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, hingga yang mengakibatkan luka berat, penyakit menular, hilangnya fungsi reproduksi, atau bahkan korban meninggal dunia. Juga adanya pidana tambahan, yakni berupa diumumkannya identitas pelaku dan dilakukannya kebiri kimia, serta memasang alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. Apabila kita perhatikan ketika Undang-Undang di atas dibuat untuk melindungi anak dari kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul kepada anak, terutama kejahatan seksual. Namun semua pada kenyataannya dari hari ke hari kejahatan seksual kepada anak tetap meningkat, sanksi hukuman yang sudah diperberat faktanya belum mampu menakuti si pelaku, sehingga mengakibatkan jumlah anak yang menjadi korban seksual makin bertambah.¹⁵

Adapun pengertian rehabilitasi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 1 Angka 14 undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang mengartikan bahwa: "Rehabilitasi adalah proses memulihkan dari gangguan kondisi fisik, psikis dan sosial supaya bisa melaksanakan perannya kembali dengan wajar baik dalam keluarga dan juga dalam masyarakat." Rehabilitasi diterapkan supaya bisa mencapai pemulihan yang sempurna terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan menurut Pasal 35 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2011 mengenai pendampingan, pembinaan, dan pemulihan kepada anak sebagai korban seksual. Rehabilitasi anak dapat diberikan dengan bentuk:

1. Motivasi dan diagnosis psikososial, yakni usaha dengan tujuan untuk memahami permasalahan yang terjadi mengenai psikososial yang nantinya akan memperbaiki atau memulihkan keberfungsian sosial anak.
2. Perawatan dan pengasuhan, yakni asuhan keperawatan pada anak yang pusatnya pada keluarga dengan tujuan untuk mengusahakan pencegahan trauma yang akan dirasakan anak.
3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, yakni pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan segi keterampilan atau keahlian tertentu terhadap anak sehingga pada akhirnya memenuhi kompetensi kewirausahaan (bisnis).
4. Bimbingan mental spiritual, yang berarti bimbingan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi mental anak agar lebih baik berdasarkan ajaran agamanya.
5. Bimbingan fisik, yakni usaha untuk mengurangi tremor pada anak. Jenis bimbingan fisik biasanya berupa olahraga rekreatif contohnya saja seperti bermain sepak bola, bermain bola kasti, dan sebagainya.
6. Pelayanan akseibilitas, yakni usaha setiap orang untuk mencari pelayanan kesehatan sesuai dengan yang diharapkan, termasuk masalah wilayah, biaya, dan akses. Sehingga pelayanan kesehatan terhadap anak mudah untuk dilakukan.

¹⁵ *Ibid.*, h. 291.

7. Bantuan dan asistensi sosial, yang berarti bahwa rehabilitasi sosial anak dalam memberikan bantuan sosial kepada orang tua yang anaknya menjadi korban kejahatan seksual. Biasanya bantuan tersebut berasal dari Kemensos RI melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak.

8. Bimbingan resosialisasi, yakni kegiatan dalam mempersiapkan pelayanan anak supaya dapat kembali diterima dalam keluarga serta masyarakat.

9. Bimbingan lanjut, yang berarti kegiatan pemantapan pribadi anak setelah mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial.

10. Rujukan, yakni suatu hal atau sumber yang dipakai dalam memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai rehabilitasi anak.

Kejahatan seksual ini dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor penyebab seperti yang dikatakan para ahli, yakni menurut Manik, dkk (2002),¹⁶ diantaranya adalah: Pertama, keluarga yakni orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya dengan iman dan akhlak sejak lahir dengan baik. Kedua, Faktor lingkungan tempat tinggal ataupun pergaulan bebas di lingkungan sekitar yang sangat mempengaruhi perkembangan emosi anak-anak yang jiwanya masih labil. Ketiga, Kondisi sosial yang minim atau masyarakat yang terlalu individualis yang menyebabkan seorang anak merupakan milik orang tuanya sendiri, serta rendahnya pandangan terhadap status Wanita. Keempat, faktor anak itu pribadi yakni anak yang mengalami gangguan perkembangan akan lebih mudah untuk dihasut, sehingga sangat sulit untuk bisa melindungi dirinya sendiri.

Walaupun kejahatan seksual kepada anak sangat mengkhawatirkan, namun belum semua kasus kejahatan seksual anak belum dapat diselesaikan semaksimal mungkin, terkhusus korban kekerasan seksual yang selama ini tidak mendapatkan penanganan khusus dibandingkan si pelaku. Artinya jarang sekali anak yang menjadi korban kejahatan seksual di rehabilitasi, tetapi malah si pelaku yang lebih diperhatikan untuk direhabilitasi. Sehingga tidak adanya penanganan yang lebih kepada anak yang menjadi korban dalam menghilangkan semua rasa trauma dan malu yang dialaminya.

KESIMPULAN

Dapat dikatakan sebagai eksploitasi anak, jika melakukan pemanfaatan atau pemerasan terhadap anak yang berumur di bawah 18 tahun atau yang dipekerjakan sebagai pekerja seks yang hasilnya untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok. Terdapat begitu banyak dasar-dasar hukum mengenai perlindungan ataupun rehabilitasi anak. Hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang bunyinya, supaya setiap anak mampu memikul tanggung jawabnya dalam

¹⁶ Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk., *kekerasan seksual*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), h. 9.

menjamin eksistensi sebagai penerus bangsa dan negara di masa depan. Maka dari itu, anak harus memperoleh kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang yang optimal, baik secara fisik, psikologis, juga sosial, sehingga anak dapat berakhlakul karimah sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Pasal 65 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjelaskan bahwa: rehabilitasi harus diberikan kepada semua korban tindak pidana, termasuk tindak pidana seksual kepada anak yang melakukan pemulihan baik dari segi fisik dan psikisnya. Disini kita harus berjuang untuk segera mencegah, menghentikan segala bentuk kekerasan, pelecehan seksual, penelantaran, dan eksploitasi tidak manusiawi lainnya bagi anak-anak, termasuk eksploitasi seksual anak, serta memberikan rehabilitasi terhadap anak yang telah menderita sebagai korban seksual, baik dari segi fisik maupun psikisnya.

REFERENCES

- Suryani, Luh Ketut. 2009. *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak*. Jakarta: Pustaka Populer Obor.
- Sari, Widya Cindy Kirana. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Anak", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>.
- Dewi P, Ratna. 2017. *Pemeriksaan Fisik dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja*. Bandar Lampung: Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari. 2021. *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*. Bojonegoro: Mazda Media.
- Anak Agaung Mas Stela Kurtikaadi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukuryati Karma. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/index>.
- Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, dan Hijrah Adhyanti Mirzana. 2021. "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 8. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/72822>.
- Temmy Andreas Habibie dan Qurotul Uyun. 2023. "Model Intervensi Islam Dalam Penanganan Gejala Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Orang Tua Yang Memiliki Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Psikologi Islam dan Kontemporer*, Vol. 3, No. 1. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jicop/article/view/12363>.
- Ibrahim Ihksan Lubis, Fatimah Zahara, dan Akmaluddin Syahputra. 2023.

- "Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor)"*, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 2. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/7571>.
- Siahaan, Nimrot. 2018. *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak"*, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6, No. 2. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/253>.
- Suntana, Ija. 2015. *Etika Pendidikan Anak*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Yustiningsih, Indriastuti. 2020. *"Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana"*, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 5. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/17206>.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk. 2022. *kekerasan seksual*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.